



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD ARIF WIDODO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 835828

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.523.008.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 1.695 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 123.008.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/150 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 205.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA ANGIN "POLYGON" - Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA ANGIN "PACIFIC" - Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. LAINNYA, MESIN JAHIT SINGER PORTABEL - Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000



6. MOTOR, KAWASAKI W 175 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 249.631.556

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.004.589.556

III. HUTANG Rp. 596.086.049

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.408.503.507

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.